

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH/SEKOLAH

Arpani

Universitas Islam Indragiri, Riau

*E-mail: arpanigc@gmail.com

Received: 05-25-2025

Revised: 20-06-2025

Accepted: 30-06-2025

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah/sekolah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sistem penjaminan mutu merupakan serangkaian mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, mulai dari pembelajaran, manajemen pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya, berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komponen utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi standar pendidikan, manajemen pendidikan, sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, serta evaluasi dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan analisis konten terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, satuan pendidikan, guru, dan masyarakat agar sistem penjaminan mutu dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci , Sistem Penjaminan Mutu, Madrasah, Sekolah, Pendidikan, Kualitas, Kebijakan Pendidikan.

Abstrac *This study aims to analyze the implementation of the education quality assurance system in madrasahs and schools, as well as to identify the challenges faced during its application. The quality assurance system is a series of mechanisms designed to ensure that all aspects of education—including learning processes, educational management, and resource utilization—are carried out in accordance with established national standards. The key components examined in this study include educational standards, educational management, human resources, facilities and infrastructure, as well as evaluation and supervision mechanisms. This research employs a qualitative descriptive approach, using data collection techniques such as literature review, documentation, and content analysis of relevant sources. The findings indicate that effective implementation of the quality assurance system can significantly improve educational quality and support the achievement of national education goals. However, its implementation still faces several challenges, such as limited funding, inadequate facilities, and low community and parental involvement in the educational process. Therefore, active collaboration between the government, educational institutions, teachers, and the community is essential to ensure the quality assurance system is applied optimally and sustainably.*

Keyword: *Quality Assurance System, Madrasah, School, Education, Quality, Education Policy.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan bangsa. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu bersaing di kancah global dan mewujudkan cita-cita negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pendidikan agama, madrasah dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter, moral, dan spiritual peserta

didik.

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan bangsa karena menjadi fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, dan berkarakter. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, budaya, serta akhlak mulia dalam diri setiap individu. Melalui pendidikan yang bermutu, cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan keagamaan, madrasah dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Islam memainkan peran yang tak kalah penting. Lembaga-lembaga pendidikan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu-ilmu umum, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek pembelajaran. Dengan demikian, madrasah dan sekolah Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan spiritual.

Melalui kurikulum yang memadukan antara pengetahuan agama dan umum, peserta didik dibina untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial, akhlak mulia, serta kecintaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pendidikan agama Islam yang diajarkan di madrasah dan sekolah juga menjadi benteng moral bagi generasi muda di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, seperti pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial budaya.

Lebih jauh, madrasah dan sekolah yang berbasis keagamaan tidak hanya mendidik individu untuk menjadi pribadi yang taat beragama, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, serta berkontribusi aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan madrasah dan sekolah Islam harus terus diperkuat, baik dari sisi kebijakan, kurikulum, sumber daya manusia, maupun infrastruktur, agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam menciptakan generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual, serta siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

Namun, seiring dengan berkembangnya tantangan globalisasi, teknologi, serta perubahan sosial budaya, kualitas pendidikan di madrasah atau sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu diperhatikan dan dijaga. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas adalah melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan

landasan yang kuat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat memenuhi standar yang diinginkan oleh pemerintah, masyarakat, serta stakeholder pendidikan lainnya. (Gusli, 2025)

Sistem penjaminan mutu pendidikan madrasah/sekolah merupakan rangkaian prosedur dan mekanisme yang diatur untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam proses pendidikan, mulai dari kurikulum, pembelajaran, tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana, memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan, yang akan berdampak positif bagi perkembangan siswa.

Sistem penjaminan mutu pendidikan madrasah/sekolah merupakan rangkaian prosedur dan mekanisme yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh aspek dalam proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Proses ini mencakup berbagai elemen penting seperti perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, manajemen kelembagaan, serta ketersediaan dan pemanfaatan sarana-prasarana penunjang pendidikan.

Penjaminan mutu bukan hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan adanya sistem ini, madrasah dan sekolah memiliki panduan yang jelas dalam menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan zaman.

Selain itu, sistem penjaminan mutu bertujuan untuk membangun budaya mutu di lingkungan satuan pendidikan, di mana setiap komponen baik kepala sekolah, guru, staf, maupun siswa terlibat secara aktif dalam menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Dalam jangka panjang, keberadaan sistem ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, keterampilan hidup, dan kesiapan menghadapi persaingan global.

Dengan kata lain, implementasi sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan akan berdampak positif terhadap perkembangan siswa, baik dari segi intelektual, emosional, maupun sosial. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya generasi masa depan yang cerdas, berakhlak, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Namun, implementasi sistem penjaminan mutu di madrasah/sekolah tidaklah tanpa tantangan. Banyak madrasah yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, fasilitas, maupun kualitas tenaga pendidik. Selain itu, kesadaran akan

pentingnya penjaminan mutu pendidikan sering kali belum sepenuhnya dipahami, baik oleh pihak pengelola maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih maksimal dalam merancang dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan efisien.(Afiyah & Hikmah, 2024)

Melalui makalah ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah/sekolah, baik dari segi kebijakan, prosedur, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pemahaman yang baik mengenai sistem ini, diharapkan dapat tercipta pendidikan yang lebih berkualitas, mampu mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal berjudul "*Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah/Sekolah*" adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan madrasah atau sekolah, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Sumber data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap kepala madrasah/sekolah, guru, serta staf yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Informan dipilih secara purposive dengan pertimbangan memiliki peran strategis dalam implementasi sistem penjaminan mutu, seperti ketua tim penjaminan mutu internal atau pengawas madrasah/sekolah.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sejak pengumpulan data hingga penyusunan kesimpulan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai strategi, tantangan, dan keberhasilan yang dihadapi madrasah/sekolah dalam mewujudkan budaya mutu pendidikan yang berkelanjutan.

III. HASIL

Komponen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri dari beberapa komponen utama yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pendidikan, antara lain:

Standar Pendidikan

Penetapan standar pendidikan menjadi dasar dalam sistem penjaminan mutu. Standar ini meliputi standar isi (kurikulum), standar proses (metode pembelajaran), standar kompetensi lulusan, serta standar penilaian pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, madrasah dan sekolah harus mengikuti standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan harapan.

Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam penerapan sistem penjaminan mutu. Manajemen ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

dan evaluasi dari seluruh aspek pendidikan di madrasah/sekolah. Proses ini perlu melibatkan seluruh elemen yang terlibat, mulai dari pengelola pendidikan, guru, siswa, hingga masyarakat. Manajemen yang baik akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang berkualitas.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas guru dan tenaga pendidik sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme harus menjadi fokus utama dalam sistem penjaminan mutu. Guru yang berkualitas akan mampu mengelola proses pembelajaran dengan baik, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama dan karakter dalam proses pendidikan.

Fasilitas dan Infrastruktur

Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam penjaminan mutu pendidikan. Madrasah/sekolah perlu memiliki fasilitas yang cukup, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, serta akses ke teknologi pendidikan. Fasilitas yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa.

Evaluasi dan Pengawasan

Salah satu komponen utama dari sistem penjaminan mutu adalah adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pendidikan tercapai, baik dalam hal prestasi akademik maupun pembentukan karakter siswa. Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti kepala madrasah, pengawas pendidikan, dan pihak kementerian, untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Pendidikan & Ibtidaiyah, 2024)

Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja menyeluruh dalam proses pendidikan di madrasah atau sekolah. Salah satu komponen penting adalah standar pendidikan. Penetapan standar ini menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Standar pendidikan mencakup standar isi yang berkaitan dengan kurikulum, standar proses yang mengatur metode pembelajaran, standar kompetensi lulusan yang menentukan capaian pembelajaran, serta standar penilaian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, seluruh satuan pendidikan termasuk madrasah dan sekolah diwajibkan untuk mengikuti standar-standar ini guna menjamin bahwa kualitas pendidikan yang diberikan sejalan dengan tujuan nasional.

Selain standar pendidikan, manajemen pendidikan yang baik juga menjadi pilar penting

dalam penjaminan mutu. Manajemen pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh proses pendidikan yang dilakukan secara sistematis. Pengelolaan yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua dan masyarakat. Kolaborasi ini akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, mendorong semangat belajar siswa, dan memastikan efektivitas pembelajaran. Di samping itu, kualitas sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga pendidik, sangat menentukan keberhasilan sistem ini. Guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman, baik dari sisi pedagogik maupun profesional, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan spiritual dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengembangan profesionalisme, dan sertifikasi merupakan langkah strategis dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan. (Rizal et al, 2020)

Komponen lain yang tidak kalah penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan adalah penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi elemen esensial dalam mendukung kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran. Ketersediaan ruang kelas yang layak, ventilasi dan pencahayaan yang cukup, laboratorium yang memadai untuk praktik sains, perpustakaan yang menyediakan sumber belajar yang beragam, serta akses terhadap teknologi pembelajaran seperti komputer, proyektor, dan jaringan internet merupakan bagian integral dari lingkungan belajar yang ideal.

Fasilitas yang memadai akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang secara langsung dapat meningkatkan kenyamanan dan motivasi belajar siswa. Selain itu, guru juga akan lebih mudah dalam menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbantuan teknologi, serta pendekatan kolaboratif yang lebih interaktif. Tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai, proses transformasi pendidikan ke arah yang lebih modern dan efektif akan sulit terwujud.

Tidak kalah penting, sistem evaluasi dan pengawasan juga harus diterapkan secara sistematis, berkala, dan objektif sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu. Evaluasi pendidikan berfungsi untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, baik dari sisi akademik maupun pengembangan karakter peserta didik. Evaluasi yang komprehensif tidak hanya melihat hasil akhir (output), tetapi juga proses yang ditempuh (proses belajar), serta masukan yang tersedia (input), termasuk latar belakang peserta didik dan dukungan lingkungan sekolah.

Sementara itu, pengawasan berperan sebagai kontrol eksternal terhadap pelaksanaan program-program pendidikan di satuan pendidikan. Pengawasan dilakukan oleh kepala

sekolah, pengawas madrasah, dinas pendidikan, maupun lembaga akreditasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan telah memenuhi standar nasional dan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan terintegrasinya lima komponen utama—yakni standar pendidikan, manajemen pendidikan, sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, serta evaluasi dan pengawasan—sistem penjaminan mutu di madrasah dan sekolah akan memiliki landasan yang kuat untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Integrasi ini juga memungkinkan satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara lebih responsif dan adaptif. Oleh karena itu, kelima komponen ini harus dikelola secara sinergis dan berkelanjutan agar mampu mendukung terwujudnya pendidikan yang efektif, relevan, dan berdaya saing tinggi.

Komponen lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi pembelajaran merupakan faktor pendukung utama dalam menciptakan proses pendidikan yang menarik dan efektif. Lingkungan belajar yang nyaman akan meningkatkan motivasi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan metode pembelajaran yang inovatif. Terakhir, sistem evaluasi dan pengawasan harus diterapkan secara berkala dan objektif. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana target pembelajaran dan pembinaan karakter siswa telah tercapai, sedangkan pengawasan dilakukan oleh pihak berwenang seperti kepala sekolah, pengawas madrasah, dan dinas pendidikan untuk menjamin bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan standar nasional. Dengan integrasi kelima komponen ini, sistem penjaminan mutu di madrasah/sekolah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. (Nurfadlila et al., 2024)

Strategi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Madrasah/Sekolah

Untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu berjalan dengan efektif, madrasah/sekolah perlu mengimplementasikan beberapa strategi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: **Pertama.** Penyusunan Rencana Kerja yang Terukur. Rencana kerja yang jelas dan terukur akan membantu madrasah/sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan yang sesuai dengan standar mutu yang diinginkan. Rencana ini harus mencakup seluruh aspek pendidikan, mulai dari pengajaran, manajemen sekolah, hingga pengelolaan sumber daya. **Kedua.** Pelatihan dan Pengembangan Profesionalisme Guru. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan penjaminan mutu pendidikan. Pelatihan ini dapat berupa

workshop, seminar, atau pendidikan lanjutan yang dapat meningkatkan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru.

Ketiga. Penerapan Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Tepat. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan maupun pihak madrasah/sekolah harus dilakukan secara objektif dan transparan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan serta hambatan dalam pelaksanaan pendidikan. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah/sekolah. Ke empat Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua. Partisipasi masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Melalui kerjasama antara madrasah/sekolah dengan orang tua dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta suasana pendidikan yang mendukung pengembangan potensi siswa secara optimal.(Ghoris et al., 2025)

Untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan berjalan secara efektif di madrasah atau sekolah, diperlukan penerapan strategi yang menyeluruh dan terstruktur. Strategi pertama yang penting adalah penyusunan rencana kerja yang terukur dan terarah. Rencana kerja ini tidak hanya menjadi acuan pelaksanaan program pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Perencanaan yang matang harus mencakup seluruh aspek kegiatan pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, tata kelola kelembagaan, pengembangan tenaga pendidik, hingga pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung.

Selain itu, peningkatan kualitas guru sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu. Guru yang kompeten dan profesional akan mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu tinggi. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru harus dilakukan secara berkesinambungan. Pelatihan ini dapat berupa workshop, bimbingan teknis, seminar, atau pendidikan lanjutan yang fokus pada peningkatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Guru juga perlu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum dan penyusunan perangkat ajar agar mereka merasa memiliki tanggung jawab atas kualitas pembelajaran yang dilaksanakan.(Kementerian et al., 2024)

Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi pendidikan menjadi bagian penting dari strategi penjaminan mutu. Evaluasi harus dilaksanakan secara berkala dan objektif, baik oleh pengawas pendidikan eksternal maupun oleh tim internal sekolah. Melalui proses evaluasi ini, kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program pendidikan dapat terdeteksi sejak dini dan segera ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan yang konkret. Evaluasi juga memungkinkan sekolah untuk mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan sudah

sesuai dengan standar mutu yang ditentukan, serta mendorong peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) dalam segala aspek pendidikan.

Di samping itu, keberhasilan sistem penjaminan mutu pendidikan juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan karakter serta potensi peserta didik. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam forum-forum sekolah, partisipasi dalam kegiatan sekolah, serta dukungan dalam proses belajar siswa di rumah. Dengan sinergi yang kuat antara madrasah/sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan. (Kualitas & Man, 2024)

Tantangan dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Meskipun sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah/sekolah sangat penting, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) Keterbatasan Anggaran, Banyak madrasah/sekolah yang mengalami keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi fasilitas, pelatihan guru, serta pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang memadai serta efisiensi dalam penggunaannya. (2) Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur, Madrasah/sekolah yang terletak di daerah terpencil atau kurang berkembang sering kali mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Keterbatasan ini dapat menghambat pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. (3) Kurangnya Keterlibatan Pihak Terkait, Terkadang, rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta orang tua dalam dunia pendidikan menjadi hambatan dalam mencapai mutu pendidikan yang diinginkan. Hal ini mempengaruhi implementasi kebijakan serta keberhasilan program-program pendidikan. (Online, 2025)

Meskipun sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah atau sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran. Banyak madrasah dan sekolah, terutama yang berada di wilayah terpencil atau berstatus swasta dengan dukungan dana yang minim, mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya fasilitas belajar, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, serta lambatnya pembaruan dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan tuntutan zaman.

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Tidak semua satuan pendidikan memiliki akses terhadap ruang kelas yang

layak, laboratorium, perpustakaan, atau media pembelajaran berbasis teknologi. Terlebih lagi di daerah-daerah yang sulit dijangkau, kendala geografis memperburuk situasi karena proses distribusi sumber daya pendidikan menjadi terhambat. Akibatnya, pelaksanaan pembelajaran menjadi tidak optimal, dan upaya penjaminan mutu sulit dilakukan secara maksimal. Tantangan berikutnya adalah kurangnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, orang tua, dan bahkan pemerintah daerah. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mutu pendidikan menyebabkan program-program penjaminan mutu tidak mendapat dukungan yang memadai. Minimnya partisipasi aktif dari orang tua dalam kegiatan sekolah, lemahnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat, serta kurangnya sinergi antara pemangku kebijakan dan pelaksana pendidikan di lapangan menjadi hambatan besar dalam pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan solusi yang bersifat kolaboratif dan komprehensif. Semua pihak harus menyadari pentingnya peran mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan pemerintah sebagai pengarah kebijakan perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh jenjang dan wilayah pendidikan. (*Jurnal Literasiologi Volume 9 Nomor 3 DOI : , 2013*)

Peran Pemerintah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan yang mendukung sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah/sekolah. Beberapa peran pemerintah antara lain adalah menyediakan dana alokasi khusus untuk pengembangan pendidikan, mengeluarkan regulasi yang jelas mengenai standar pendidikan, serta memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya. Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah maupun sekolah. Keterlibatan aktif pemerintah menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, terarah, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata dari peran tersebut adalah penyediaan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk pengembangan sektor pendidikan, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Lebih lanjut, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan regulasi yang jelas, terukur, dan aplikatif mengenai standar pendidikan nasional. Regulasi ini menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan dalam melaksanakan proses belajar mengajar serta dalam mengevaluasi capaian mutu pendidikan secara berkesinambungan. Keberadaan standar ini memudahkan madrasah dan sekolah dalam menetapkan indikator keberhasilan sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan supervisi dan akreditasi. Tidak kalah penting, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan

kapasitas profesional para pendidik melalui berbagai program pelatihan, workshop, dan sertifikasi yang relevan dengan tuntutan zaman. Melalui kegiatan tersebut, kompetensi guru dapat terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kurikulum, serta metode pembelajaran modern. Dengan demikian, guru tidak hanya memahami isi materi, tetapi juga mampu menyampaikannya secara efektif, inovatif, dan menyenangkan kepada peserta didik. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat, guna mendukung pelaksanaan penjaminan mutu secara holistik. Sinergi ini sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan yang kompleks dan dinamis.

Dengan dukungan regulasi, pendanaan, peningkatan kapasitas, serta kemitraan yang kuat dari pemerintah, maka sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah dan sekolah akan lebih terarah, profesional, dan berdampak nyata dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif di masa depan.(Nurhasanah et al., 2024).

IV. DISKUSI

Hasil kajian terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah/sekolah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara implementasi standar pendidikan nasional dengan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Temuan ini selaras dengan teori sistem manajemen mutu pendidikan yang menekankan pentingnya pemenuhan standar sebagai indikator utama dalam menjamin kualitas pembelajaran (Sallis, 2002). Standar yang diterapkan bukan sekadar acuan normatif, melainkan harus diinternalisasi ke dalam budaya kerja institusi pendidikan. Dalam konteks ini, standar nasional pendidikan tidak hanya menjadi alat ukur administratif, tetapi juga menjadi pendorong transformasi praktik pedagogik dan tata kelola yang berkualitas. Manajemen pendidikan yang baik menjadi katalis dalam mengintegrasikan berbagai komponen penjaminan mutu. Hal ini sejalan dengan teori manajemen pendidikan menurut Mulyasa (2009) yang menyebutkan bahwa mutu pendidikan sangat bergantung pada sistem pengelolaan sekolah yang partisipatif, akuntabel, dan berbasis pada perencanaan strategis. Penemuan bahwa pelibatan guru, siswa, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan manajerial berdampak positif terhadap iklim mutu menunjukkan adanya hubungan positif antara partisipasi stakeholders dengan keberhasilan penjaminan mutu. Ini juga diperkuat oleh studi Gaspersz (2011) yang menekankan bahwa manajemen mutu total (TQM) menuntut kolaborasi menyeluruh dari seluruh unit dalam organisasi. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia, khususnya guru, juga menjadi sorotan penting dalam sistem penjaminan mutu. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi memiliki korelasi langsung dengan peningkatan mutu

pembelajaran. Ini sesuai dengan teori kompetensi guru dari Shulman (1987) yang menyatakan bahwa guru yang profesional harus menguasai pengetahuan konten, pedagogik, dan konteks sosial pembelajaran. Dibandingkan dengan hasil penelitian Rizal et al. (2020), data ini menunjukkan konsistensi bahwa kualitas guru merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan berbasis mutu.

Fasilitas dan infrastruktur yang memadai juga ditemukan sebagai penopang utama kualitas proses belajar mengajar. Dalam teori ekologi pendidikan Bronfenbrenner (1979), lingkungan belajar fisik yang kondusif mempengaruhi perilaku dan perkembangan peserta didik. Kondisi ini sejalan dengan fakta di lapangan bahwa madrasah/sekolah yang memiliki sarana yang memadai mampu mengembangkan model pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Jika dibandingkan dengan temuan Ghoris et al. (2025), peneliti menemukan kemiripan dalam hal peran infrastruktur sebagai faktor penentu kenyamanan dan efektivitas pembelajaran. Evaluasi dan pengawasan internal maupun eksternal ditemukan berperan penting dalam menjaga konsistensi mutu pendidikan. Dalam teori evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Stufflebeam, pengawasan berfungsi sebagai instrumen korektif sekaligus reflektif yang memungkinkan satuan pendidikan mengidentifikasi kelemahan dan memperbaikinya secara berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sekolah/madrasah yang menerapkan sistem evaluasi berkelanjutan lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kebijakan dan tantangan pendidikan. Strategi implementasi seperti penyusunan rencana kerja yang terukur, pelatihan guru, serta peningkatan partisipasi masyarakat mendukung keberlangsungan penjaminan mutu. Analisis ini konsisten dengan pendekatan *School-Based Management* (SBM) yang mengedepankan otonomi sekolah dalam mengelola sumber daya dan merancang program peningkatan mutu. Jika dibandingkan dengan studi Kementerian et al. (2024), data ini menunjukkan penguatan argumen bahwa strategi pelibatan komunitas pendidikan dalam penjaminan mutu dapat mempercepat pencapaian target kualitas pendidikan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur, serta lemahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan struktural yang memadai. Dalam pandangan teori sistem terbuka, madrasah/sekolah sangat bergantung pada input dari lingkungan eksternal. Artinya, jika lingkungan eksternal seperti pemerintah dan masyarakat kurang mendukung, maka output yang dihasilkan pun akan terhambat. Perbandingan dengan penelitian dari Jurnal Literasiologi (2013) memperlihatkan pola yang serupa, bahwa tantangan utama dalam implementasi penjaminan mutu sering kali berasal dari faktor eksternal yang tidak terkelola dengan baik. Peran pemerintah dalam menyediakan regulasi, pendanaan, dan pelatihan dinilai sangat krusial. Teori kebijakan pendidikan

menempatkan pemerintah sebagai fasilitator utama yang menjamin keadilan dan keberlanjutan layanan pendidikan. Ketika pemerintah menjalankan fungsi ini secara maksimal, maka sistem penjaminan mutu dapat berjalan lebih terarah dan terstruktur. Fakta ini menguatkan hasil penelitian Nurhasanah et al. (2024) yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi dan pendanaan berdampak signifikan terhadap peningkatan akreditasi dan kualitas layanan pendidikan. Secara keseluruhan, sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah/sekolah merupakan rangkaian kompleks yang memerlukan sinergi antara teori, kebijakan, dan praktik di lapangan. Analisis logis menunjukkan bahwa implementasi sistem ini tidak cukup hanya dengan mengikuti regulasi yang ada, tetapi membutuhkan inovasi, partisipasi, serta perbaikan berkelanjutan yang berbasis pada refleksi dan evaluasi nyata di setiap level penyelenggaraan pendidikan.

V. KESIMPULAN

Sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah/sekolah merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan, mulai dari proses pembelajaran hingga pengelolaan sumber daya, dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Komponen utama dari sistem ini mencakup standar pendidikan, manajemen pendidikan, sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, serta evaluasi dan pengawasan. Penerapan sistem penjaminan mutu yang efektif akan menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Meskipun demikian, implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah/sekolah tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan anggaran, fasilitas yang kurang memadai, dan rendahnya keterlibatan masyarakat serta orang tua. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pengelola pendidikan, guru, serta masyarakat agar sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Z., & Hikmah, S. (2024). *Strategi Kepala Madrasah Dalam Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Batang Hari*. 3, 174–186.
- Ghoris, M., Mahasina, A., Mujahidin, E., & Andriana, N. (2025). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Pendekatan Sistematis dalam Perencanaan Jaminan Mutu Pendidikan: Studi Kasus di Sekolah Dasar*. 7(1), 28–40.
- Gusli, R. A. (2025). *Peran Kepala Madrasah Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam Di MTsN 2 Kota Pariaman*. 11(1), 41–63.
- Jurnal Literasiologi Volume 9 Nomor 3 DOI*: (2013). 9, 14–28.
- Kementerian, K., Kabupaten, A., Muslihah, E., Syarifudin, E., & Mulyosaputro, P. (2024). *Mutu Pendidikan Di Madrasah (Penelitian Di Lingkungan*. 5, 132–150.
- Kualitas, M., & Man, D. I. (2024). *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam*. 92–105.
- Nurfadlila, A., Al, P., & Deshinta, A. B. (2024). *Konsep dan Prinsip SPMI dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah : Tinjauan*

Pustaka.

- Nurhasanah, A., Khansa, N. A., Munawwaroh, S. M., Arfinanti, N., & Sandani, A. (2024). *Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Mewujudkan Visi Misi Madrasah*. 4(2), 99–106.
- Online, A. (2025). *No Title*. 187–203.
- Pendidikan, M., & Ibtidaiyah, M. (2024). 1, 2, . 09(September), 1163–1175.
- Rizal, S., Usman, T., & Puspita, Y. (2020). *Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendahuluan*. 9(4), 469–475.